

Awig-Awig Pernikahan Desa Sengkerang Sebagai Bentuk Perlawanan Simbolik Kaum Subaltern Terhadap Polarisasi Gender

Paenal Juni Harian*, Nadira Baenarti, Dinda Juliana Novita, Imam Malik

Program Studi Pendidikan Sosiologi, FKIP, Universitas Mataram

Corresponding Author: faenaljuni15@gmail.com

Article History

Received : November 12th, 2025

Revised : November 23th, 2025

Accepted : December 17th, 2025

Abstract: Perempuan di negara dunia ketiga seperti Indonesia yang populer dengan sebutan kaum subaltern seringkali mendapat perlakuan subordinasi disebabkan polarisasi gender yang menenggelamkan hak dan status sosial mereka. Mengakarnya budaya patriarki menjadikan polarisasi gender masih subur di Indonesia, tidak terkecuali di Pulau Lombok yang masyarakatnya cenderung masih memiliki prinsip dan pola pikir konservatif karena memegang teguh warisan nilai nenek moyang. Mengacu pada kondisi demikian, Desa Sengkerang di Kabupaten Lombok Tengah membuat sebuah awig-awig pernikahan sebagai simbol perlawanan atas polarisasi gender dan menguatkan kedudukan kaum perempuan di masyarakat. Awig-awig tersebut berisi ketentuan bahwa mahar perempuan (*pisuke*) ditentukan besarnya berdasarkan tingkat pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji awig-awig pernikahan di Desa Sengkerang sebagai bentuk perlawanan simbolik yang dilakukan oleh kaum subaltern terhadap polarisasi dan stereotip gender yang mengakar dalam masyarakat. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, data diperoleh dari wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa awig-awig pernikahan tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif yang mengatur hubungan sosial, tetapi juga sebagai ruang negosiasi dan penegasan identitas kaum subaltern dalam menolak pembatasan-pembatasan peran gender yang konvensional. Awig-awig tersebut mengandung nilai-nilai yang menempatkan kesetaraan dan keadilan gender sebagai bagian integral dari tata sosial desa. Dengan demikian, awig-awig pernikahan di Desa Sengkerang memberikan kontribusi penting dalam melawan dominasi patriarki melalui representasi simbolik yang memperkuat suara dan posisi kaum subaltern dalam struktur sosial. Temuan ini membuka wawasan baru tentang hubungan antara tradisi lokal dan dinamika perlawanan sosial terhadap ketidaksetaraan gender.

Keywords: Awig-awig pernikahan, kaum subaltern, perlawanan simbolik, polarisasi gender

PENDAHULUAN

Isu gender merupakan isu sosial yang tak pernah ada ujungnya (Kusumaningrum, 2022). Kompleksitas problema gender tidak hanya terjadi di negara-negara tertentu, akan tetapi sudah menjadi permasalahan secara global (Sinaci, 2024). Terlebih di negara dunia ketiga seperti Indonesia, polarisasi gender menjadi hegemoni di tengah masyarakat, sehingga luput dari perhatian karena dianggap bukan masalah yang serius (Permataningtyas, 2021). Hal itu terjadi akibat dominasi masyarakat dengan pola pikir tradisional yang kebanyakan menempati wilayah pedesaan (Suparman, 2018); Khaerani (2017). Dalam paradigma sosiologi poskolonial,

kondisi tersebut secara tidak langsung merugikan kaum perempuan sebagai entitas sekunder yang kedudukan dan status sosialnya selalu di bawah laki-laki alias subordinasi (Baduge et al., 2024) yang mengakibatkan perempuan sulit berkembang dan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam berbagai sektor seperti pendidikan (Ayuning & Septia, 2023) dan pekerjaan di ruang publik (Shalim & Sulastri, 2024). Selain itu, subordinasi gender juga semakin mempertegas bahwa kehidupan perempuan tidak akan jauh dari dapur, sumur, dan kasur (Wulandari, 2022).

Perempuan tradisional di negara dunia ketiga yang notabene adalah negara bekas jajahan yang menjadi objek penindasan dan

diperlakukan subordinat dikenal dengan kaum subaltern (Bahardur, 2017). Istilah subaltern sendiri dipopulerkan oleh seorang ahli sastra dan kritikus feminis asal India bernama Gayatri Spivak (Suryawati et al., 2021). Dalam pandangan Spivak, perempuan subaltern hanyalah alat bagi para kapitalis (Setiawan, 2018). Suara mereka selalu direpresentasikan oleh kelompok penguasa yang didominasi oleh patriarki, sehingga hal tersebut menjadi realitas semu. Oleh sebab itu, jika suara perempuan ingin didengar, maka representasi itu harus muncul dari kaum mereka sendiri dengan cara perempuan mendapatkan posisi istimewa dan kuasa (Layali, 2024). Kedua hal tersebut akan mampu didapatkan jika perempuan memiliki kesempatan dan akses yang layak dalam pendidikan, pekerjaan, kelas, gender, dan kewarganegaraan (Yunairi, 2020).

Indonesia sebagai negara bekas jajahan menjadi rumah bagi kelompok subaltern (Fahmilda & Putri, 2021). Pemikiran konservatif yang patriarkis pada masyarakat Indonesia menjadi pupuk yang menyuburkan bibit-bibit ketidakadilan gender. Perempuan sebagai kelompok gender yang dirugikan sulit melakukan perlawanan disebabkan rendahnya tingkat pendidikan (Larasati & Hamidsyukrie, 2022). Pendidikan merupakan strategi paling diplomatis dalam membenahi persepsi masyarakat terhadap gender perempuan (Malihah et al., 2024), seperti yang terjadi di Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, NTB.

Masyarakat Desa Sengkerang memiliki persepsi bahwa perempuan yang berpendidikan berhak untuk mendapatkan status sosial tinggi dan kehidupan yang layak. Hal tersebut tercermin dalam budaya pernikahan yang sudah menjadi awig-awig (hukum adat yang disepakati) di desa tersebut, di mana laki-laki yang ingin menikahi perempuan dengan predikat sarjana strata satu (S1) harus membayar harga mahar (*pisuke*) dalam nominal yang tergolong tinggi (Aminah, 2017). Ketentuan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan atas jerih payah si perempuan setelah berhasil menempuh pendidikan tinggi yang mayoritas perempuan di desa tersebut belum mampu mendapatkannya (Fiqriadi, 2021). Di sisi lain, konstruksi awig-awig tersebut berangkat dari perspektif frontal masyarakat yang beranggapan bahwa tidak pantas bagi perempuan berpendidikan mendapatkan mahar rendah, dan tidak pantas pula bagi perempuan kurang berpendidikan

mendapatkan mahar tinggi. Oleh karena itu, mahar pernikahan dan tingkat pendidikan menjadi aspek dasar yang membentuk status sosial perempuan di Desa Sengkerang dan menjadi simbol perlawanan kaum subaltern terhadap polarisasi gender pada masyarakat tradisional.

METODE

Riset ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi. Pendekatan etnografi digunakan guna memudahkan periset dalam mempelajari serta mengungkap data dan fakta terkait perilaku masyarakat dalam konteks sosio kultural dan makna simbolik dalam pelaksanaan pernikahan di Desa Sengkerang sebagai simbol perlawanan kaum subaltern terhadap polarisasi gender (Yusuf, 2014); Yusanto (2019). Data primer riset didapatkan dari hasil observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder didapatkan dari studi literatur relevan. Data pada riset ini dianalisis dengan merujuk pada tahapan yang dikemukakan Creswell, yaitu dengan cara menyajikan data (*data display*), kemudian mereduksi data tersebut (Safinah & Arifin, 2021). Apabila terdapat data yang kurang relevan, maka periset akan kembali mengumpulkan data yang diperlukan kemudian melakukan verifikasi ulang (Zohiro et al., 2024). Jika data sudah tepat dan sesuai, maka akan langsung ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Budaya pernikahan di Desa Sengkerang secara umum dilaksanakan sebagaimana prosesi adat pernikahan Sasak yaitu dimulai dengan lamaran atau maling (membawa lari calon perempuan), *besejati* (mengabarkan informasi pernikahan ke keluarga perempuan), *selabar* (tawar-menawar harga mahar), *ngawinan* (akad nikah), *nyongkolan* (arak-arakan pengantin), dan yang terakhir *bales lampak nae* (kunjungan keluarga laki-laki secara tertutup ke rumah keluarga perempuan) (Zohiro et al., 2024). Sebagai desa yang masih memegang erat warisan nenek moyang, prosesi adat di Desa Sengkerang masih berjalan dengan baik dan dilestarikan, namun prosesi adat pernikahan di desa tersebut kini sudah lebih banyak dilakukan dengan cara lamaran atau dalam bahasa Sasak disebut *bait* (ambil) calon, menggantikan dominasi tradisi

maling perempuan (merarik). Hal tersebut terjadi karena Desa Sengkerang, khususnya di Dusun Sengkerang Tiga yang mengadopsi awig-awig (peraturan adat lokal) tentang pemberian nominal mahar (*pisuke*) kepada laki-laki yang ingin mempersunting perempuan di Dusun Sengkerang Tiga. Pemberian *pisuke* pada keluarga perempuan terjadi pada proses *selabar*, yang pada umumnya akan terjadi tawar-menawar 2-3 kali oleh masing-masing kepala dusun.

Kepala Dusun Sengkerang Tiga yang merupakan informan kunci memaparkan bahwa awig-awig tersebut sudah berjalan beberapa tahun terakhir dengan bentuk abstrak atau verbal (tidak tertulis). Masyarakat di Dusun Sengkerang Tiga sudah menganggap kebiasaan mematok nominal mahar bagi perempuan terpelajar menjadi sebuah adat yang tanpa sadar terus dijalankan. Semakin tinggi jenjang pendidikan dan semakin banyak biaya yang dihabiskan, maka semakin tinggi pula mahar bagi si perempuan. Hal itu bukan hanya semata-mata karena kebiasaan masyarakat di sana, akan tetapi juga tidak jarang dari pihak laki-laki sudah memahami dan lumrah dengan hal demikian, sehingga tidak ada proses tawar-menawar mahar, bahkan justru dari pihak laki-laki yang dengan sendirinya memberikan nominal yang tinggi.

Pemberlakuan awig-awig ini juga mampu mendongkrak jumlah kaum perempuan terpelajar di Desa Sengkerang, khususnya di Dusun Sengkerang Tiga. Berdasarkan penuturan informan, persentase perempuan yang lanjut ke perguruan tinggi dengan yang tidak lanjut adalah 75%:25% berdasarkan pengamatan dan pencatatan dusun pada tahun 2025. Ekskalasi tingkat lulusan sarjana kaum perempuan di Desa Sengkerang juga berhasil meredam kasus pernikahan anak. Informan mengungkapkan bahwa kasus pernikahan anak sudah mulai memudar sejak tahun 2016, seiring meningkatnya minat dan kesadaran masyarakat terutama kaum perempuan untuk menempuh jenjang pendidikan tinggi.

Pembahasan

Stratifikasi Pendidikan dalam Praktik Mahar

Dalam konteks awig-awig pernikahan di Desa Sengkerang, besaran mahar yang ditentukan berdasarkan tingkat pendidikan perempuan menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam memaknai posisi perempuan di ruang sosial dan budaya. Jika sebelumnya

perempuan sering ditempatkan sebagai pihak yang pasif, kini pendidikan tinggi memberikan nilai tawar yang lebih besar terhadap dirinya. Mahar yang lebih tinggi untuk perempuan berpendidikan tinggi tidak semata-mata dilihat sebagai bentuk materialisasi nilai, tetapi juga sebagai simbol penghargaan atas investasi keluarga terhadap pendidikan perempuan serta pengakuan sosial terhadap kapabilitas yang dimilikinya.

Pendidikan tinggi dalam hal ini berfungsi sebagai instrumen simbolik untuk meredam polarisasi gender yang selama ini membatasi peran perempuan hanya pada ranah domestik. Ketika perempuan dengan pendidikan tinggi dihargai lebih dalam tradisi mahar, masyarakat secara tidak langsung menggeser stereotip lama yang menempatkan perempuan hanya sebagai "beban ekonomi" dalam pernikahan. Sebaliknya, mereka dipandang sebagai subjek berdaya yang memiliki potensi pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas sosial yang bernilai.

Polarisasi gender yang cenderung menempatkan laki-laki sebagai dominan dan perempuan sebagai subordinat mengalami titik balik melalui mekanisme simbolik ini. Mahar berbasis pendidikan menjadi bentuk resistensi kultural masyarakat Desa Sengkerang terhadap stereotip gender, karena memperlihatkan bahwa perempuan bukan sekadar objek dalam perkawinan, melainkan individu yang nilai sosialnya dapat meningkat seiring dengan pencapaian intelektualnya. Dengan demikian, awig-awig ini berperan strategis dalam membuka ruang keadilan gender dan mendorong kesadaran kolektif bahwa pendidikan tinggi bukan hanya milik laki-laki, melainkan juga menjadi hak dan sarana pemberdayaan perempuan.

Perlawanan Simbolik Kaum Subaltern di Desa Sengkerang

Perempuan dalam masyarakat pedesaan kerap ditempatkan pada posisi subaltern, yaitu kelompok yang tidak memiliki ruang cukup untuk menyuarakan kepentingannya karena terpinggirkan oleh dominasi struktur sosial patriarkis. Namun, dalam konteks awig-awig pernikahan di Desa Sengkerang, muncul bentuk perlawanan simbolik yang dilakukan oleh kaum perempuan melalui mekanisme penentuan mahar berbasis tingkat pendidikan. Awig-awig ini dapat dipahami sebagai ruang simbolik di mana perempuan melakukan negosiasi terhadap nilai dan identitasnya. Jika pada tataran budaya

tradisional perempuan sering direduksi hanya pada peran domestik, kini tingkat pendidikan mereka dijadikan dasar legitimasi sosial yang menentukan besaran mahar. Praktik ini bukan sekadar soal ekonomi, melainkan bentuk resistensi kultural yang menggeser cara pandang masyarakat terhadap perempuan.

Dengan mengaitkan mahar pada capaian pendidikan, perempuan subaltern Desa Sengkerang menyampaikan pesan simbolik bahwa mereka memiliki nilai yang setara dan layak dihargai. Hal ini sekaligus menantang konstruksi gender lama yang menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan dalam perkawinan (Huda, 2025). Mahar yang lebih tinggi untuk perempuan berpendidikan tinggi merepresentasikan pengakuan sosial bahwa perempuan memiliki potensi intelektual dan daya tawar dalam relasi sosial-budaya. Perlawanan simbolik ini tidak diwujudkan dalam bentuk konfrontasi langsung (Riandini & Alfian, 2022), melainkan melalui jalur budaya yang melekat dalam tradisi pernikahan. Di sinilah strategi simbolik perempuan subaltern terlihat: mereka menggunakan aturan adat (awig-awig) sebagai sarana untuk mendefinisikan ulang posisi mereka dalam struktur sosial. Dengan kata lain, awig-awig pernikahan di Desa Sengkerang berfungsi sebagai arena dialektika antara tradisi, patriarki, dan upaya perempuan untuk memperoleh pengakuan serta kesetaraan gender.

Melalui mekanisme ini, perempuan subaltern bukan hanya sekadar objek dalam perkawinan, tetapi juga menjadi subjek aktif yang mampu memanfaatkan instrumen kultural untuk memperjuangkan kepentingannya. Dengan demikian, awig-awig pernikahan di Desa Sengkerang merefleksikan bentuk perlawanan simbolik yang cerdas, halus, dan berakar pada budaya lokal, sekaligus membuka jalan bagi transformasi sosial menuju kesetaraan gender. Gayatri Chakravorty Spivak melontarkan judul esai dengan konotasi pertanyaan, *Can the Subaltern Speak?* yang menekankan bahwa subaltern adalah kelompok sosial yang termarginalkan dan tidak memiliki kesempatan untuk menyuarakan kepentingannya secara langsung karena mereka tertutup oleh struktur dominasi seperti kolonialisme, kapitalisme, dan patriarki. Karena suara perempuan tidak didengar atau tidak dianggap sah dalam ruang publik, perempuan sering diposisikan sebagai subaltern dalam masyarakat tradisional.

Kerangka ini dapat digunakan untuk membaca awig-awig pernikahan Desa Sengkerang, yang menentukan besaran mahar berdasarkan pendidikan perempuan. Perempuan pada mulanya berada dalam relasi pernikahan dan dianggap sebagai pihak yang diterima oleh keluarga laki-laki dengan nilai tukar yang ditentukan oleh tradisi patriarkis. Namun, perempuan secara simbolik melawan polarisasi gender dengan menilai pendidikan sebagai mahar.

Menurut Spivak, perlawanan subaltern dapat berupa resistensi simbolik yang berasal dari struktur budaya yang ada daripada konfrontasi terbuka (Al Masjid et al., 2023). Hal ini juga memiliki kesinambungan dengan teori Perlawanan Simbolik dari James Scott yang menekankan bahwa perlawanan simbolik bersifat halus, terselubung, dan tidak konfrontatif. Perempuan Desa Sengkerang menggunakan awig-awig yang merupakan sebuah instrumen adat untuk memperbaiki dan menegaskan posisi mereka. Oleh karena itu, perempuan yang memiliki pendidikan tinggi memiliki nilai sosial yang lebih tinggi, yang secara tidak langsung memaksa masyarakat dan laki-laki untuk menerima kemampuan intelektual dan kemandirian perempuan.

Hal ini menjadi penting karena awig-awig tersebut menghadirkan logika baru dalam relasi gender. Polarisasi gender yang sebelumnya membagi laki-laki sebagai pihak dominan dan perempuan sebagai pihak subordinat mulai tereduksi melalui simbol penghargaan berbasis pendidikan. Perempuan tidak lagi sekadar dilihat sebagai pihak yang pasif dalam perkawinan, melainkan sebagai subjek berdaya yang memiliki modal simbolik dan sosial untuk mengubah persepsi masyarakat. Dengan menggunakan perspektif feminisme Spivak, awig-awig pernikahan di Desa Sengkerang dapat dipahami sebagai praktik kultural di mana kaum perempuan subaltern “berbicara” melalui simbol. Mereka mungkin tidak secara langsung menyuarakan penolakan terhadap patriarki, tetapi dengan melembagakan aturan tentang mahar berbasis pendidikan, mereka berhasil menegosiasikan nilai mereka dan melawan stereotip gender yang meminggirkan.

KESIMPULAN

Awig-awig pernikahan di Desa Sengkerang tidak hanya berfungsi sebagai regulasi sosial tradisional, tetapi juga sebagai sarana perlawanan simbolik oleh kelompok subaltern terhadap pola-pola dominasi dan pembagian peran gender yang kaku. Melalui praktik dan nilai-nilai yang terkandung dalam awig-awig, komunitas lokal mampu memodifikasi, menegosiasikan, dan menantang sistem polaritas gender yang selama ini memarginalkan kaum perempuan. Dengan demikian, awig-awig pernikahan menjadi instrumen penting dalam mereproduksi sekaligus mereformasi struktur sosial yang lebih inklusif dan berkeadilan gender di tingkat lokal. Perlawanan simbolik ini memperlihatkan bahwa perempuan tidak sepenuhnya pasif, melainkan mampu menyuarakan kepentingan mereka melalui strategi budaya yang diakui dan dilegitimasi masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah Rabb Semesta Alam yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam melaksanakan proses penelitian hingga penulisan artikel ini. Terima kasih penulis ucapkan kepada Civitas Akademika FKIP Universitas Mataram yang telah memberikan pendanaan atas penelitian ini. Terima kasih juga tertuju pada dosen pendamping, para informan, dan pihak-pihak yang terlibat membantu setiap proses penelitian.

REFERENSI

- Al Masjid, A., Trisharsiwi, T., Setiawan, A. D., & Marwanti, E. (2023). Resistensi Kritis Ki Hadjar Dewantara pada Surat Kabar De Express: Sebuah Kajian Postkolonialisme. *GERAM (Gerakan Aktif Menulis)*, 11(2), 20-29.
- Aminah, S. (2017). Stratifikasi Sosial Dalam Perkawinan Masyarakat Islam Sasak (Studi Pada Perkawinan Masyarakat Desa Sengkerang, Lombok Tengah). *Jurnal Sosiologi Agama*, 11(2), 209-228. <https://doi.org/10.14421/jsa.2017.%25x>.
- Ayuning, T., & Septia, E. (2023). Ketidakadilan Gender dalam Novel Hilda: Cinta, Luka Dan Perjuangan Karya Muryassarotul Hafidzoh. *Alinea: Jurnal Bahasa, Sastra dan Pengajaran*, 3(1), 80-89. <https://doi.org/10.58218/alinea.v3i1.448>.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2025, Awig-awig, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, KBBI Daring, dilihat 12 Mei 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- Baduge, M., S., D., S., P., Garth, B., Boyd, L., Ward, K., Joseph, K., Proimos, J., & Teede, H., J. (2024). Barriers to Advancing Women Nurses in Healthcare Leadership: A Systematic Review and Meta-Synthesis. *EClinicalMedicine*, 67, 1-13. <https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2023.102354>.
- Bahardur, I. (2017). Pribumi Subaltern dalam Novel-Novel Indonesia Pascakolonial. *Jurnal Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia*, 3(1), 89-100.
- Layali, D., Z. (2024). *Analisis Posisi Perempuan pada Jabatan Strategis Pemerintahan di Provinsi Jambi (Studi pada Kantor BKD Provinsi Jambi)*. Skripsi. Universitas Jambi.
- Fahmilda, Y., & Putri, T., C. (2021). Narasi Citra Perempuan dalam Cerpen Racun Untuk Tuan: Karya Iksaka Banu: Kajian Feminisme Poskolonial. *Jurnal Salaka: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya Indonesia*, 3(1), 1-9. <https://doi.org/10.33751/jsalaka.v3i1.3321>.
- Fiqriadi, M., Z. (2021). *Pandangan Masyarakat Tentang Mahar Bertingkat dalam Perkawinan Perempuan Muslim Sasak di Kabupaten Lombok Tengah*. Tesis. UIN Mataram.
- Huda, C. (2025). *Kontruksi Gender Pada Relasi Pernikahan Menurut Calon Pengantin dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Lahei Barito Utara Kalimantan Tengah)*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia.
- Khaerani, S., N. (2017). Kesetaraan dan Ketidakadilan Gender dalam Bidang Ekonomi Pada Masyarakat Tradisional Sasak di Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. *QAWWAM: Journal for Gender Mainstreaming*, 11(1), 59-76. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v11i1.723>.
- Kusumaningrum, Z., S. (2022). Pemosisian Perempuan dan Relasi Kuasa dalam Tradisi Pertunangan: Suatu Tinjauan

- Antropologi Gender. *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 6(1), 1-15. <https://doi.org/10.14710/endogami.6.1.%25p>.
- Larasati, W., R., & Hamidsyukrie, Z., M. (2022). Kesetaraan Gender Ditinjau Dari Akses Pendidikan dan Pekerjaan Bagi Perempuan di Dusun Sade Desa Rembitan. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 9(2), 41-47. <https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v9i2.339>.
- Malihah, L., Zabidi, H., Atkia, N., Apifah, N. N., & Haryanti, P. (2024). Kepemimpinan Perempuan dan Kesetaraan Gender: Sebuah Tinjauan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 24(2), 1094-1103.
- Permataningtyas, W. (2021). Korupsi dan Ketidaksetaraan Gender Sebagai Tantangan Utama Good Governance di India. *Jurnal Academia Praja: Jurnal Magister Ilmu Pemerintahan*. (41): 134-153. <https://doi.org/10.36859/jap.v4i1.252>
- Riandini, A. & Alfian, I., N. (2022). Perlawanan Simbolik Komunitas LGBT terhadap Stigma dan Diskriminasi. *Buletin Riset Psikologi dan Kesehatan Mental (BRPKM)*, 2(1), 389-397.
- Safinah & Arifin, Z. (2021). Otoritas Kepemimpinan Karismatik Tuan Guru dalam Membentuk Budaya Religius. *Evaluasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(2), 311-330. <https://doi.org/10.32478/evaluasi.v5i2.754>
- Setiawan, R. (2018). Subaltern, Politik Etis, dan Hegemoni dalam Perspektif Spivak. *Poetika: Jurnal Ilmu Sastra*. 6(1)-12-25. <https://doi.org/10.22146/poetika.v6i1.35013>.
- Setiawan, R. (2018). Subaltern, Politik Etis, dan Hegemoni dalam Perspektif Spivak. *Poetika: Jurnal Ilmu Sastra*, 6(1), 12-25.
- Shalim, S., F., & Sulastri, R. (2024). Kesetaraan Gender di Dunia Industri Kota Tangerang. *Gunung Djati Conference Series*. Januari 2024, Bandung, Indonesia. pp. 31-38.
- Sinaci, M. (2024). An Ethical Problem in the Current Global Economy: Gender Pay Gap. *Ovidius University Annals, Series Economic Sciences*, 24(1), 318-327.
- Suparman, E. (2018). Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Masyarakat Tradisional. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(7), 556-559.
- Suryawati, I., Seran, A., & Sigit, R., R. (2021). Perempuan Subaltern Dunia Ketiga dalam Tinjauan Teori Feminisme Poskolonial Gayatri Chakravorty Spivak. *FOCUS: Journal of Social Studies*, 2(2), 88-96. <https://doi.org/10.37010/fcs.v2i2.336>
- Wulandari, N., Indrianti, D., T., & Hilmi, M., I. (2022). Analisis Gender Peran Perempuan Pesisir pada Ketahanan Keluarga di Desa Puger Kulon Kabupaten Jember. *Jendela PLS*, 7(1), 52-60. <https://doi.org/10.37058/jpls.v7i1.4758>.
- Yunairi, D. (2020). Konsep Feminisme Gayatri Chakravorty Spivak dan Upaya Membangun Keluarga Unggul (Kajian Feminisme Modern). *Sanjiwani: Jurnal Filsafat*, 11(1), 103-113. <https://doi.org/10.25078/sanjiwani.v11i1.2067>.
- Yusanto, Y. (2020). Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif. *Journal of Scientific Communication (JSC)*, 1(1), 1-13. <https://dx.doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764>.
- Zohiro, M., Q., A., B., Harian, P., J., Hazami, K., N., Santiani, & Wahidah, A. (2024). Sasak Traditional Marriage System in Avoiding Conflict and Preventing Disharmony Between Families in the Modern Era. *Journal of Etika Demokrasi*, 9(1), 24-36. <https://doi.org/10.26618/jed.v9i1.13074>.